

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan tanggung jawab bersama. Dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat diharapkan memberi kontribusi secara aktif untuk menentukan arah dari pembangunan. Menurut Dedi Haryono, partisipasi yang ada di dalam pembangunan tidak hanya sekedar “ikut serta” secara fisik, tapi juga ikut terlibat dalam kegiatan yang memungkinkan masyarakat melakukan identifikasi terhadap masalah sendiri, menemukan akar permasalahan, mengorganisasikan masalah, hingga menetapkan program pembangunan.¹

Terdapat sembilan bidang pembangunan nasional dengan arah kebijakannya masing-masing menurut Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 yakni pembangunan dalam bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan

¹Rini Rinawati, “*Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan*”, Jurnal Kajian Gender, Vol 20, No 3, tahun 2004, hlm 2.

lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan. Akan tetapi karena adanya berbagai faktor keterbatasan yang dihadapi oleh suatu bangsa terhadap pelaksanaan pembangunan, seperti keterbatasan dana, waktu, sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pembangunan, mengakibatkan suatu negara dihadapkan pada keharusan untuk menentukan prioritas dalam pembangunannya. Karena kemampuan yang dimiliki kurang memungkinkan untuk menyelenggarakan pembangunan dengan intensitas yang sama.²

Tuntutan dalam menentukan prioritas pembangunan bagi negara yang tengah berkembang seperti Indonesia pada umumnya ada pada pembangunan ekonomi. Salah satu ciri keterbelakangan negara Indonesia di dalam bidang ekonomi adalah banyaknya masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini :³

² Retno Endah Supeni, *Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pengembangan Manajemen Usaha Kecil*, Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan, Jurnal Fakultas Ekonomi UNIMUS, tahun 2011, hlm 6.

³Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik No 56/07/Th.XXIII*, <https://www.bps.go.id>, diakses tanggal 04 November 2020.

Tahun	Maret	September
2013	28,17 juta orang	28,60 juta orang
2014	28,28 juta orang	27,73 juta orang
2015	28,59 juta orang	28,51 juta orang
2016	28,01 juta orang	27,76 juta orang
2017	27,77 juta orang	26,58 juta orang
2018	25,95 juta orang	25,67 juta orang
2019	25,14 juta orang	24,79 juta orang
2020	26,42 juta orang	27,55 juta orang

Tabel 1.1 Profil kemiskinan di Indonesia oleh Badan Pusat Statistik 15 Juli 2020

Tabel tersebut menunjukkan bahwa presentase dari penduduk miskin pada bulan Maret 2020 sebesar 9,78%, meningkat sebesar 0,56% terhadap bulan September tahun 2019 dan meningkat sebesar 0,37% terhadap bulan Maret tahun 2019. Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang pada bulan September 2019 dan meningkat sebanyak 1,28 Juta orang terhadap bulan Maret 2019.

Menurut Kuncoro, pembangunan ekonomi adalah salah satu upaya untuk membangun kehidupan masyarakat, bangsa dan negara secara keseluruhan agar kesejahteraan umum mampu terwujud. Seperti yang tertuang dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pembangunan menjadi cermin dari pengamalan Pancasila sila ke lima, "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*" yang berarti upaya peningkatan pembangunan serta hasilnya menuju pada tercapainya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.⁴

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh suatu negara harus dilihat sebagai salah satu upaya yang terencana, sistematis, terprogram, serta berkelanjutan agar peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup seluruh masyarakat dapat terpenuhi. Karena pada akhirnya pembangunan ekonomi yang berhasil akan memberikan dampak positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

⁴ Sutarno, *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 1993-2000*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 8, No 2, tahun 2003, hlm 5.

Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong adanya pertumbuhan ekonomi. Begitu pula sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dapat memperlancar proses pembangunan ekonomi. Todaro mengemukakan pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses peningkatan *output* dari waktu ke waktu yang menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara atau dengan kata lain salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk meningkatkan adanya pembangunan dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menunjukkan tingkat perubahan ekonomi. Di Indonesia, pemerintah memegang peran besar dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Salah satu kebijakan yang dimaksud adalah perpajakan.⁵

⁵ Ahmad Ma'ruf, "*Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : Determinan dan Prospeknya*", Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol 9, No 1, tahun 2008, hlm 2.

Selain pemerintah, seluruh masyarakat juga terlibat untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan ekonomi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan mengarahkan kepada munculnya kemampuan untuk terlibat dan ikut serta secara penuh, aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan yang berasal dari dalam diri maupun luar dirinya terkait seluruh proses kegiatan pembangunan. Dalam proses pembangunan ada elemen-elemen atau unsur yang tergabung didalamnya, yakni pihak pemerintah, kelompok masyarakat, hingga kelompok warga yang ada ditingkat desa. Maka perempuan sebagai bagian dari anggota masyarakat yang juga merupakan ujung tombak dari proses pembangunan menjadi sangat penting keberadaannya karena pada dasarnya perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Program pembangunan menjadi alat dalam rangka memenuhi hak-hak warga negara, baik laki-laki maupun perempuan supaya kesetaraan diantara keduanya bisa terwujud.

Kaum perempuan saat ini sudah tidak bisa disamakan dengan perempuan pada jaman dahulu, karena dilihat dari perkembangannya perempuan juga bisa memberikan kontribusi berupa gagasan, waktu, hingga tenaga dalam menciptakan suatu inovasi yang bisa digunakan dalam upaya pembangunan. Misalnya saja di kota-kota besar, perempuan begitu diberdayakan pada bidang industri ataupun perkantoran dimana mereka dijadikan sebagai perempuan pekerja yang produktif. Hal semacam itulah yang sebenarnya cukup membuktikan bahwa saat ini perempuan tidak bisa lagi untuk dipandang sebagai kaum yang terpinggirkan. Guna menciptakan kolaborasi yang maksimal dalam upaya pembangunan ekonomi yang jauh lebih baik, maka kolaborasi oleh masing-masing elemen harus bisa disatukan demi menyamakan visi dan misi tanpa harus membedakan gender sebagai jurang pemisah.⁶

Pada dasarnya, peranan perempuan dalam upaya pembangunan merupakan suatu hal yang penting karena

⁶ Sofiani, “Membuka Ruang Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan”, Jurnal Muwazah, Vol 1, No 1, tahun 2009, hlm.63-72.

keterlibatan perempuan diharapkan mampu memunculkan kebijakan-kebijakan ataupun keputusan yang peduli terhadap pemenuhan kebutuhan perempuan itu sendiri. Perempuan yang dilibatkan dalam pembangunan ekonomi dapat memberikan usulan kegiatan yang menjadi prioritas kebutuhan dasar kelompok perempuan yang biasanya terlewatkan ketika ada penyusunan rencana kegiatan oleh laki-laki. Posisi perempuan dalam pembangunan adalah sebagai partisipan ataupun subjek pembangunan bukan sebagai objek seperti saat ini.

Keterlibatan perempuan semakin menjadi salah satu syarat dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Negara dianggap sulit mencapai kesejahteraan apabila kelompok perempuan dibiarkan tertinggal, tersisihkan ataupun tertindas. Seperti yang disampaikan oleh Darwin bahwasannya bangsa yang tidak bisa menghormati kelompok perempuannya maka bangsa tersebut tidak akan pernah menjadi besar, baik saat ini ataupun dimasa yang akan datang. Salah satu alasan

jatuhnya sebuah bangsa secara drastis bisa disebabkan oleh tidak adanya rasa hormat terhadap kehidupan kelompok perempuan yang digambarkan sebagai sakti (istri). Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan yang menyeluruh dari suatu negara harus melibatkan perempuan secara penuh pada setiap bidang kehidupan. Bahwa kelompok perempuan sebagai warga negara maupun sebagai penggerak proses pembangunan memiliki hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki disetiap kegiatan pembangunan yang ada di seluruh bidang kehidupan.⁷

Upaya pembangunan bangsa yang melibatkan perempuan di dalamnya merupakan salah satu upaya dari peningkatan kemandirian hingga peningkatan kemampuan perempuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melibatkan perempuan di dalam proses pembangunan ekonomi tidak berarti hanya sebagai suatu tindakan yang

⁷Angelica E Manembu, Skripsi “*Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*”, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL UNSRAT, 2017.

dilihat dari sisi keadilan terhadap hak perempuan. Akan tetapi peran yang dilaksanakan oleh kaum perempuan dalam keikutsertaannya di dalam bidang pembangunan ekonomi adalah tindakan untuk mengangkat harkat dan kualitas perempuan itu sendiri.

Peran perempuan saat ini diarahkan untuk membantu pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat, beberapa di antaranya dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas serta kemandirian sumber daya manusia, juga untuk mendorong keaktifan masyarakat. Maka dalam rangka membentuk partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan ekonomi, perlu ada pengembangan kualitas diri terhadap perempuan melalui pemberdayaan.

Perempuan yang perlu diberdayakan mencakup seluruh kaum perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan sebagai bagian dari anggota masyarakat memiliki hak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki serta berkewajiban untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Demi percepatan proses pembangunan ekonomi maka penggalian

potensi perempuan perlu terus digali sesuai dengan ilmu, pengalaman, hingga profesinya, agar ada keseimbangan antara perannya dalam menunjang pembangunan dengan kewajiban terhadap keluarga.

Menurut Priyono, pemberdayaan dapat menciptakan manusia yang siap secara mental dalam menghadapi pilihan-pilihan serta mampu secara mandiri untuk menentukan pilihan. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan, mendapatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan, dan memberdayakan mereka secara bersama-sama. Karena proses pemberdayaan didasari oleh cita-cita bahwa masyarakat harus bisa mengambil tanggung jawab dalam merumuskan kebutuhan, mengusahakan kesejahteraan, hingga mewujudkan tujuan hidup mereka sendiri. Pemberdayaan ditujukan guna membangun sebuah struktur di dalam masyarakat yang memfasilitasi tumbuhnya partisipasi secara demokratis pada

saat terjadi pengambilan keputusan yang menjadi bagian penting dari pembangunan.⁸

Pemberdayaan menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas diri manusia melalui pemberian pengetahuan dan keterampilan sehingga manusia memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Tujuan dari pemberdayaan yakni untuk menciptakan individu yang mampu mengetahui kebutuhan dan cara memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri. Pemberdayaan menjadi salah satu strategi dalam memberikan kekuatan kepada masyarakat supaya mampu hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhannya.⁹

Pemberdayaan dilaksanakan dengan kesadaran serta partisipasi penuh dari berbagai pihak yang terkait demi meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai sumberdaya pembangunan supaya dapat mengenali masalah-masalah

⁸Zubaedi, *“Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik”*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 2.

⁹Musfiroh Amro Aini, *“Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga”*, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Vol VII, No. 7, tahun 2018, hlm. 3.

yang ada dalam upaya pengembangan diri menuju keadaan yang lebih baik dari sebelumnya, berani memanfaatkan sumberdaya yang ada demi mewujudkan kepentingan diri dan kelompoknya.

Selanjutnya, Kartasasmita mengemukakan bahwa memberdayakan adalah upaya yang bisa digunakan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang masih dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari ruang lingkup kemiskinan dan keterbelakangan atau dengan kata lain upaya memberdayakan masyarakat adalah untuk memampukan dan memandirikan masyarakat.¹⁰

Dari pengertian-pengertian tersebut maka jelaslah bahwa pemberdayaan adalah suatu pendekatan yang menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dari proses pembangunan dengan menggunakan cara peningkatan kemampuan serta memberikan wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan sebagai upaya membangun diri serta

¹⁰Dwi Jayanti, “*Hubungan Strategi Pemberdayaan Peternak Dengan Kesejahteraan Peternak*”, Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Vol 1, No 3, tahun 2017, hlm 3.

lingkungan secara mandiri. Pemberdayaan hadir sebagai jalan keluar dari bagi individu maupun kelompok untuk mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan adanya masa depan yang sesuai dengan keinginan mereka. Dengan kata lain, individu mampu menentukan pilihan untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Individu bisa menunjukkan bahwasannya setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Dalam pemberdayaan perempuan terdapat hak perempuan yang perlu diperjuangkan agar bisa terpenuhi. Seperti hak dalam menentukan pilihan dan dalam mempengaruhi arah perubahan melalui kesiapan melakukan kontrol atas sumber daya material maupun non material yang penting. Pendekatan dalam pemberdayaan perempuan tidak terfokus untuk meningkatkan kedudukan mereka terhadap kaum laki-laki, namun berupaya untuk memberikan kekuasaan kepada perempuan melalui upaya pemberian kekuasaan di tengah masyarakat setelah kelompok

perempuan tersebut diberdayakan menggunakan konsep pemberdayaan terhadap perempuan.

Konsep pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk memampukan perempuan dalam memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, politik, ekonomi, dan sosial budaya, agar perempuan mampu membawa diri dalam meningkatkan rasa percaya diri untuk ikut berperan dan berpartisipasi aktif dalam mencari solusi guna memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan juga konsep diri. Upaya dalam memampukan perempuan ini dijalankan sesuai pada visi, misi serta tujuan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan melalui program-program.¹¹

Keadaan peran perempuan masih dipengaruhi oleh masa lampau, ideologi, kultur dan praktek hidup sehari-hari. Hingga kini budaya patriarki masih langgeng berkembang ditatanan masyarakat Indonesia. Budaya ini dapat ditemukan diberbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, budaya,

¹¹ Tutik Sulistyowati, “*Model Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Profesionalitas dan Daya Saing Untuk Menghadapi Komersialisasi Dunia Kerja*”, Jurnal Perempuan dan Anak, Vol 1, No 1, tahun 2015, hlm 4.

pendidikan, hingga hukum sekalipun. Budaya tersebut menjadikan adanya ketidaksetaraan gender yang memposisikan laki-laki sebagai pihak yang kuat, dan berkuasa, dari pada perempuan. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan mendorong terbentuknya kesenjangan dan ketidakadilan gender, yang mempengaruhi berbagai bidang dan aspek kegiatan manusia. Sehingga posisi dan peranan laki-laki memiliki porsi yang lebih besar dan dominan dibandingkan posisi perempuan.

Ini yang menjadi kunci mengapa partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi mengalami kelemahan. Para perempuan yang dianggap memiliki perbedaan peran dengan laki-laki dalam berbagai bidang kemasyarakatan, pada dasarnya memiliki potensi yang sama dengan laki-laki. Karena perbedaan peran tersebut hanya bentuk pembagian kerja secara seksual. Pembagian kerja secara seksual ini membuat perempuan merasa memiliki ruang yang lebih sempit dalam menentukan minat atau kegiatan yang diinginkan. Masyarakat telah menciptakan sendiri kegiatan

mana yang cocok bagi laki-laki dan kegiatan yang cocok bagi perempuan. Secara tidak disadari, konsep berpikir yang berlandaskan pada jenis kelamin akan memunculkan bentuk-bentuk ketidakadilan dalam masyarakat, terutama pada kelompok perempuan. Padahal banyak kegiatan yang secara kualitas bisa dikerjakan oleh perempuan.

Kenyataan bahwa porsi kaum perempuan masih tertinggal dalam hal partisipasi di bidang ekonomi terlihat dari tidak dinilainya keberadaan perempuan dalam kegiatan ekonomi karena dianggap hanya sebagai penambah pendapatan keluarga saja. Padahal peran perempuan dalam ekonomi keluarga tidak bisa dianggap remeh karena berbagai fakta menunjukkan bahwa peran perempuan mampu menyelamatkan ekonomi keluarga. Meski demikian, peran ekonomi yang ditanggung oleh perempuan belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena terhalang oleh berbagai kendala seperti keterbatasan waktu, kurang mendapat dukungan, hingga kurang akses terhadap informasi.

Seiring dengan berjalannya waktu, pengetahuan masyarakat telah berubah. Kegiatan-kegiatan yang mulanya hanya milik kelompok gender tertentu telah menjadi milik individu-individu yang bisa membuktikan kemampuan dan profesionalitasnya. Hal ini yang kemudian mendorong kaum perempuan semakin bersemangat untuk berpartisipasi dalam proses pemberdayaan agar mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Baik dengan menjadi kaum yang terdidik maupun pelaku kegiatan ekonomi.

Di Indonesia sendiri, pada dasarnya perempuan telah ikut berperan dalam bidang pembangunan ekonomi. Kemampuan perempuan untuk ikut berkontribusi telah dibuktikan melalui beberapa fenomena yang melibatkan peran perempuan, contohnya dalam sektor perikanan, data koalisi rakyat untuk keadilan perikanan (kiara) tahun 2015 membuktikan bahwa perempuan mengerjakan 70% pekerjaan produksi perikanan dengan waktu bekerja sampai 17 jam. Selain itu, menurut laporan Tenaga Kerja Ekonomi

Kreatif dan Badan Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwa perempuan secara konsisten menjadi pelaku utama di industri kreatif sejak tahun 2011 hingga 2016. Presentase perempuan dalam sektor ini sebesar 53,86%. Dan pada tahun 2016, jumlah perempuan yang bekerja di sektor ekonomi kreatif sebanyak 9,4 juta orang.¹² Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mampu secara kualitas namun kurang secara kuantitas.

Masih rendahnya keterwakilan perempuan secara kuantitatif dalam bidang pembangunan ekonomi inilah yang kemudian menjadi salah satu permasalahan utama untuk melahirkan upaya pemberdayaan sebagai solusi untuk memberikan ruang berpartisipasi yang sama bagi seluruh perempuan di dalam pembangunan ekonomi. Maka dari uraian tersebut, akan dibahas lebih jauh mengenai peran pemberdayaan terhadap kaum perempuan sehingga mampu melahirkan kualitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan

¹²Data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, diakses pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 13:22.

ekonomi, dan sebagai fokus dari penelitian ini, peneliti mengangkat judul “Implementasi Pemberdayaan Perempuan Guna Menunjang Pembangunan Ekonomi”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberdayaan perempuan untuk menunjang pembangunan ekonomi?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan guna menunjang pembangunan ekonomi?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari kemungkinan adanya kesalahan dalam menafsirkan maksud judul tersebut, serta mengingat akan luasnya permasalahan yang timbul ketika membahas pemberdayaan perempuan, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya mencakup mengenai tahap pelaksanaan pemberdayaan untuk mengoptimalkan potensi

diri agar mampu berkontribusi dalam menunjang pembangunan ekonomi.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemberdayaan perempuan untuk menunjang pembangunan ekonomi.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan guna menunjang pembangunan ekonomi.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif yang dapat membuka wawasan dan bermanfaat baik bagi insan akademis maupun masyarakat umum dalam mengembangkan pemahaman di bidang pemberdayaan masyarakat, terutama kajian tentang implementasi pemberdayaan perempuan guna menunjang pembangunan ekonomi.

2. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber acuan dan referensi bagi pengembang penelitian studi Pengembangan Masyarakat Islam terutama mengenai Pemberdayaan perempuan.